



RENCANA STRATEGIS



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2024 – 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus dapat bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Atas kasih sayang-Nya pula kami dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai acuan atau panduan kerja selama 3 (tiga) tahun kedepan, yakni Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang ini berisikan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan akan diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya

Jombang, 3 Maret 2023

SEKRETARIS DPRD


Drs. BAMBANG SRIYADI, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19680709 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD	6
2.2 Sumber Daya	18
2.3 Kinerja Pelayanan	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	52
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Set.DPRD	55
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	60
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Set. DPRD Kab. Jombang	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKSANAAN	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR/TABEL

	Halaman
GAMBAR 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang	8
Tabel 2.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III	9
Tabel 2.2 Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Khusus	9
Tabel 2.3 Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV	9
Tabel 2.4 Komposisi menurut golongan/ke pangkatan	19
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	19
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan	20
Tabel 2.7 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal	20
Tabel 2.8 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	20
Tabel 2.9 InventarisBarang	21
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 2019- 2023	24
Tabel 2.11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023	39
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	56
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab.Jombang	60

Tabel 5.1. TUJUAN, SASARAN , STRETEGI DAN KEBIJAKAN Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 2024- 2026	62
Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	65
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang – undang tersebut diamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang disusuan mendasarai adalah adanya Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, diperlukan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Adapun fungsi dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang yaitu merupakan kerangka dasar perencanaan untuk mengembangkan strategi dan memberikan arahan dan tujuan organisasi di masa depan dengan optimalisasi peran sumber daya organisasi serta memudahkan melakukan kontrol terhadap semua program dan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Dengan adanya Renstra tersebut, maka setiap aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang memiliki panduan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas fungsi yang diemban serta merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja. terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola.

Dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu 3 (tiga) tahun Tahun 2024-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
19. Peraturan bupati Nomor 10 tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dimaksudkan :

- a. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai RPD;
- b. Sebagai dasar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jombang.

2. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Sekretariat DPRD;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Sekretariat DPRD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD kabupaten Jombang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Jombang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD
- 3.4 Telaahan renstra K/L dan renstra Sekretariat DPRD
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD

Di Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

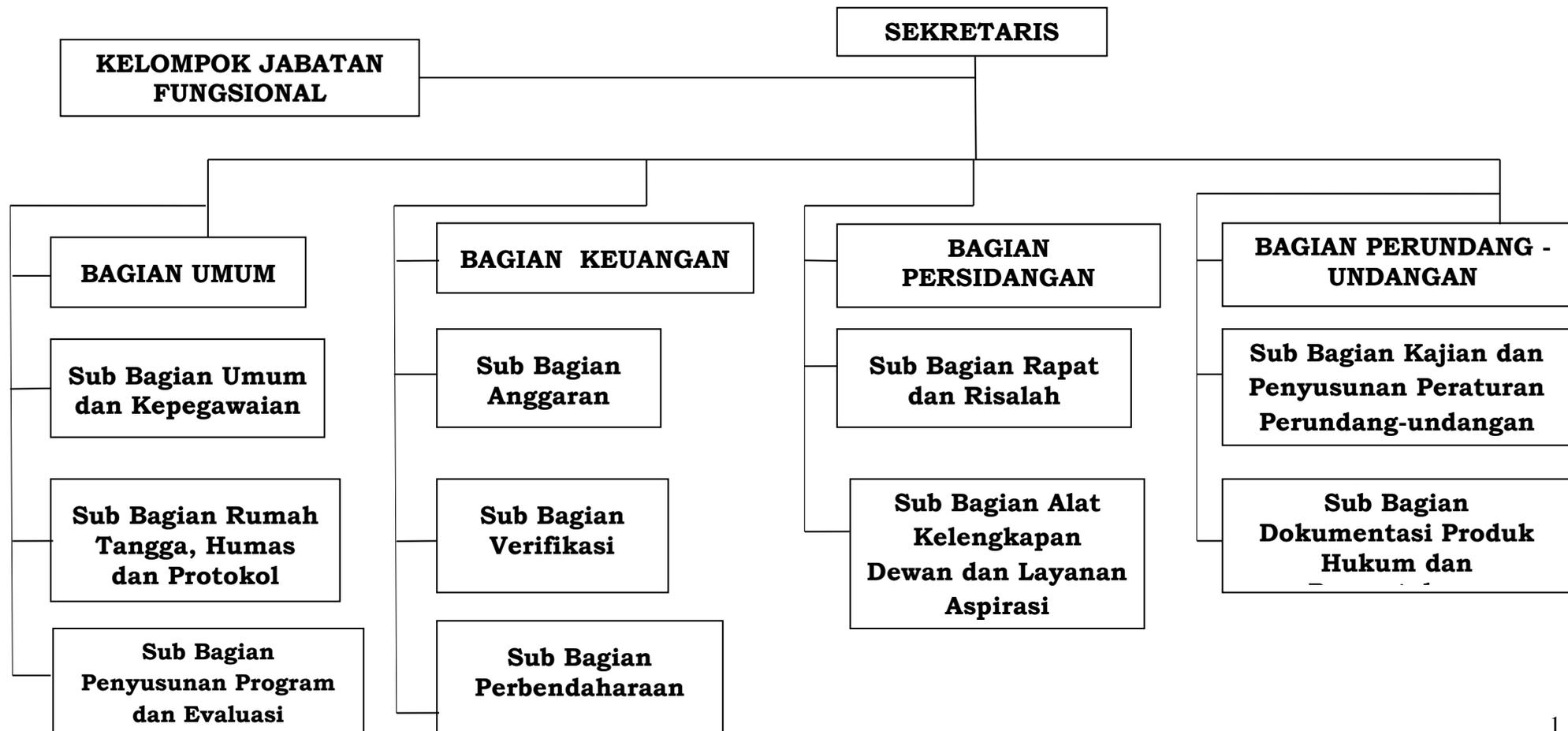
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD .
- b. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi; dan
 3. Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat.
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan.
- f. Jabatan Fungsional Umum.

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji

dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian pegawai, mulai dari jabatan eselon II dan III, jabatan fungsional, jabatan eselon IV serta staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang per bulan Januari 2018 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**GAMBAR 2.1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG**



Tabel 2.1. Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III

No.	Nama Jabatan	ESELON
1.	Sekretaris	II
2.	Kepala Bagian Umum	III
3.	Kepala Bagian Persidangan	III
4.	Kepala Bagian Perundang-undangan	III
5.	Kepala Bagian Keuangan	III

Tabel 2.2. Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			
2			
3			

Tabel 2.3. Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV

No.	Jabatan	ESELON
1	Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat	IV
2	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah	IV
3	Kepala Sub Bagian Verifikasi	IV
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV
5	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan	IV
6	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.	IV
7	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV
8	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol	IV
9	Kepala Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	IV
10	Kepala Sub Bagian Anggaran	IV

Sedangkan untuk Jumlah Total Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah 52 personil dengan catatan sebanyak 28 ASN dan 24 personil adalah tenaga kontrak termasuk tenaga keamanan 7 orang .

Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Kepala Bagian Umum

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bagian ;
- i. Pengelolaan kearsipan;

- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun Kepala Bagian umum membawahi:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar;
- b. Menyiapkan surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja;
- c. Melakukan penggandaan, distribusi surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- f. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Mempersiapkan bahan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang menyangkut pengadaan barang dan jasa;
- h. Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

2.2. Sub Bagian Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai tugas:

- a. Melakukan urusan teknik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan gedung DPRD;
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengatur dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;

- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana pada acara rapat dan penerimaan tamu resmi DPRD serta Sekretariat DPRD;
- e. Melaksanakan tugas tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acara resmi dan kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, sarana dan prasarana barang milik daerah di Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang daerah;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pers, melaksanakan mengumpulkan bahan pengembangan perangkat keras, program aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi serta melakukan dokumentasi, publikasi, serta kehumasan terkait kegiatan DPRD;
- i. Mengelola *front office* DPRD; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

2.3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Melaksanakan pengolahan data;
- c. Melaksanakan perencanaan program;
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program;
- f. Merencanakan kebutuhan rumah tangga;
- g. Merencanakan kebutuhan perlengkapan DPRD;
- h. Merencanakan pembahasan pertanggungjawaban APBD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan kesekretariatan DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD;
- c. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Keuangan membawahi :

3.1. Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data anggaran;
- b. Membantu penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Menyiapkan pelaksanaan anggaran;
- d. Mengadakan penelitian anggaran;
- e. Menyusun laporan dan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Merencanakan pembahasan KUA PPAS;
- g. Menyusun pembahasan APBD dan P-APBD;
- h. Menganalisa bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

3.2. Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
- c. Meneliti dan mencatat semua transaksi keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; dan
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

3.3. Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyelesaian administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Melakukan pembayaran gaji, dan tunjangan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- c. Melakukan tata pembukuan keuangan termasuk menyiapkan dan membuat laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Mengkoordinasikan PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk mengajukan SPP dan SPM; dan
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

4. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD;
- b. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- c. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD;
- d. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- f. Fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan membawahi :

4.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana jadwal rapat DPRD;
- b. Menyiapkan bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir;
- c. Melakukan penggandaan dan distribusi bahan rapat;
- d. Menyiapkan bahan naskah sidang jalannya rapat paripurna untuk Pimpinan DPRD;
- e. Menyusun dan menggandakan notulen rapat DPRD;
- f. Memelihara dokumentasi atau rekaman hasil rapat DPRD;
- g. Menyusun dan menggandakan risalah rapat Paripurna DPRD; dan
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan.

4.2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rapat-rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. Menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;

- c. Menyusun notulen/catatan rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan dari pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- e. Melaksanakan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat secara tidak langsung untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. Menghimpun informasi, mengolah dan mendistribusikan berkas surat-surat pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan DPRD;
- g. Menghimpun dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang telah diolah DPRD yang akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait;
- h. Menyiapkan bahan guna pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi/keterangan mengenai kegiatan DPRD;
- i. Mencermati berita atau pernyataan yang dikemukakan Pimpinan, Anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada Pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tindak lanjut DPRD;
- j. Memfasilitasi reses DPRD;
- k. Mengelola data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- l. Menyusun Pokok Pikiran DPRD;
- m. Melaksanakan kerjasama antara Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan.

5. Bagian Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi

pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan kode etik DPRD, mengelola tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD;
- b. Penghimpun, perawatan dan penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
- c. Pengelolaan perpustakaan;
- d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk pengambilan keputusan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan membawahi :

5.1. Sub Bagian Kajian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas

- a. Menyiapkan bahan kajian, penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD serta keputusan Sekretaris DPRD;
- b. Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan;
- c. Menyebarkan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD;
- d. Memelihara berkas pengajuan dan penyusunan Peraturan Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program legislası daerah;
- f. Melaksanakan fasilitasi kegiatan tenaga ahli dan tenaga fungsional;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kode etik DPRD; dan
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perundang-undangan.

5.2. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan, mempunyai tugas

- a. Menghimpun dan mendokumentasikan berita – berita surat kabar, pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan tugas DPRD;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan serta produk hukum lainnya;
- c. Menyiapkan dan menyimpan data bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Mengelola perpustakaan DPRD;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan dari luar DPRD; dan
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat DPRD

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988 menjelaskan bahwa dapat dirujuk keberadaan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang termasuk Jabatan Fungsional Keahlian bidang Peneliti dan Perencana.

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	IV	5 orang	2	3
2	III	18 orang	11	7
3	II	5 orang	3	2
4	I	0 orang	0	0
Jumlah		28 orang	17 Orang	11 Orang

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Sekretariat DPRD yang terbanyak golongan III, sebanyak 17 orang (52,9 % dari seluruh staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki - Laki	Perempuan
1	Eselon II	1 orang	1	0
2	Eselon III	4 orang	1	3
3	Eselon IV	10 orang	6	4

4	Fungsional Khusus*	- orang	0	0
5	Pelaksana	14 orang	10	4
Jumlah		29 orang	19	10

Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	2 orang
Diploma (D3)	- orang
Sarjana (S1)	20 orang
Magister (S2)	6 orang
Jumlah	28 orang

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim II - 1 Diklatpim III - 4, Diklatpim IV - 10		
2	Fungsional Khusus			
3	Fungsional Umum			

Tabel 2.8. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki -Laki	Perempuan	
1	ASN	20	9	29
2	HONORER	21	3	24

Saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mempunyai gedung baru untuk ruang kerja komisi. Adapun Sarana dan Prasarana Kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	19	18	1	-
2	Kendaraan Dinas R2	25	23	2	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Tanah bang. Kantor pemerintah	1	1	-	-
2	Pompa air	6	6	-	-
3	Mesin tik manual	-	-	-	-
4	Mesin tik elektrik	7	4	3	-
5	Mesin penghitung uang	1	1	-	-
6	Mesin foto copy	3	2	-	1
5	Mesin perekam stensil	1	1	-	-
6	Lemari besi	4	4	-	-
7	Rak besi	5	5	-	-
8	Alat Penghancur Kertas	3	3	-	-
9	Papan Tulis	2	2	-	-
10	Filing kabinet	37	37	-	-
11	Copy Board/Elektrik White Board	2	2	-	-
12	Brankas	1	1	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
13	Lemari kaca	9	9	-	-
14	Papan visual	14	14	-	-
15	Overhead projector	1	1	-	-
16	Lemari kayu	57	57	-	-
17	Meja kayu	93	93	-	-
18	Meja Rapat	37	37	-	-
19	Meja tulis	69	69	-	-
20	Kursi Rapat	50	50	-	-
21	Kursi Tamu	15	15	-	-
22	Kursi Tangan	96	96	-	-
23	Kursi Putar	132	132	-	-
24	Kursi lipat	19	-	9	10
25	Sofa	23	23	-	-
26	Korden	5	5	-	-
27	Karpet	3	3	-	-
28	Lemari Es	5	5	-	-
29	Ac. Sentral	4	4	-	2
30	Ac unit	31	28	1	2
31	Ac split	65	65	-	-
32	Televisi	25	23	-	2
33	Mice conference	73	73	-	-
34	Podium	2	2	-	-
35	Handy cam	5	5	-	-
36	Alat pemadam portabel	24	24	-	-
37	PC Unit	26	26	-	-
38	Printer	33	36	-	6
39	Scanner	1	1	-	-
40	Meja kerja	24	-	-	-
41	Camera	11	7	-	4
42	Proyektor/attachment	34	34	-	-
43	Peralatan video visual	3	3	-	-
44	Genset	1	1	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
45	Bracket	2	2	-	-
46	Video Monitor	2	2	-	-
47	Handy Talky	22	22	-	-
48	Mixer	1	1	-	-
49	PABX	21	21	-	-
50	Pemancar FM	1	1	-	-
51	Tape Recorder	2	2	-	-
52	Layar film	1	1	-	-
53	Video monitor	2	2	-	-
54	Gazebo	1	1	-	-
55	Camera elektrik	1	1	-	-

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah mengacu dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, layanan administrasi kedewanan adalah proses mulai dari perencanaan ,pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.10 (terlampir) yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dan Tabel. 2.11 (terlampir) yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD .

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD				Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran	%				100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	77%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah layanan adm. Perkantoran	Jenis layanan				39 jenis layanan	39 jenis layanan	N/A	N/A	N/A	39 jenis layanan	30 jenis layanan	N/A	N/A	N/A	100%	76,92 %	N/A	N/A	N/A
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat DPRD	%				80%	90%	N/A	N/A	N/A	92%	81%	N/A	N/A	N/A	115%	90%	N/A	N/A	N/A
4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Unit				6 unit	6 unit	N/A	N/A	N/A	121 unit	19 unit	N/A	N/A	N/A	2016, 67%	317%	N/A	N/A	N/A
5	Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah Kegiatan				4 unit	4 unit	N/A	N/A	N/A	13 unit	6 unit	N/A	N/A	N/A	325%	150%	N/A	N/A	N/A

6	Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasarana gedung kantor		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasaran gedung kantor	Jumlah kgt				3 kgt	3 kgt	N/A	N/A	N/A	2 kgt	2 kgt	N/A	N/A	N/A	67%	67%	N/A	N/A	N/A
7	Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasaran gedung kantor	Jumlah Kegiatan				3 kg	3 kg	N/A	N/A	N/A	3 kgt	3 kgt	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
8	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya		Jumlah pakaian dinas pim & Anggota DPRD serta pakaian olah raga setwan	Jumlah stell				261	261	N/A	N/A	N/A	306 stell	200 stell	N/A	N/A	N/A	117%	77%	N/A	N/A	N/A
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Kursus dan pelatihan	%				80%	90%	N/A	N/A	N/A	369%	331%	N/A	N/A	N/A	369%	331%	N/A	N/A	N/A
10	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Belanja kursus - kursus singkat atau pelatihan , belanja bimtek setwan	Jumlah orang				13 orang	13 orang	N/A	N/A	N/A	48 orang	43 orang	N/A	N/A	N/A	369%	331%	N/A	N/A	N/A
11	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .	%				100%	100%	N/A	N/A	N/A	80%	100%	N/A	N/A	N/A	80%	100%	N/A	N/A	N/A
12	Penyusunan Rencana strategis startegis		Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	Jumlah Dok				0 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	-	1 dok	N/A	N/A	N/A	0%	100%	N/A	N/A	N/A
13	Penyusunan		Jumlah Dok Renja	Jumlah				2	2	N/A	N/A	N/A	2 dok	2	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A

	rencana kerja SKPD		yang tersusun	ah Dok				dok	dok					dok								
14	penyusunan laporan capaian kinerja		Jumlah Dok . laporan capaian kinerja yang tersusun	Jumlah Dok				1 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
15	Penyusunan laporan keuangan SKPD		Jumlah Dok . Laporan keuangan yang tersusun	Jumlah Dok				1 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
16	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi	Nlai IKM				76,61 nilai ikm	79 nilai ikm	N/A	N/A	N/A	79,88 ikm	80,95 ikm	N/A	N/A	N/A	79,88 ikm	80,95 ikm	N/A	N/A	N/A
17	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD									N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
18			Jumlah peserta Medical Check up Dewan					50 orang	50 orang	N/A	N/A	N/A	7 peserta	1 peserta	N/A	N/A	N/A	7 peserta	1 peserta	N/A	N/A	N/A
19			Jumlah Peserta Bimtek Dewan					50 peserta	50 peserta	N/A	N/A	N/A	13 peserta	30 peserta	N/A	N/A	N/A	13 peserta	30 peserta	N/A	N/A	N/A
20			Jumlah frekwensi Kunker luar daerah Dewan					33 kunker	33 kunker	N/A	N/A	N/A	60 kunker	22 kunker	N/A	N/A	N/A	60 kunker	22 kunker	N/A	N/A	N/A
21	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah		Jumlah kunker pim dan anggota DPRD luar daerah	Kali				16	16	N/A	N/A	N/A	16 kunker%	12 kunker	N/A	N/A	N/A	16 kunker	12 kunker	N/A	N/A	N/A

22	Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Nilai IKM			76,61	79	N/A	N/A	N/A	76,64	77,97	N/A	N/A	N/A	100,04%	98,70%	N/A	N/A	N/A
23	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Terlaksananya rapat pembahasan raperda	Jumlah rapat			35	35	N/A	N/A	N/A	0	1	N/A	N/A	N/A	0%	2,86%	N/A	N/A	N/A
24	Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD		Terlaksananya Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD	Jumlah perumusan Raperda inisiatif DPRD dan Keputusan produk hukum lainnya			25	25	N/A	N/A	N/A	4	20	N/A	N/A	N/A	16%	80%	N/A	N/A	N/A
25	Program Layanan Persidangan		Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas layanan persidangan	Nilai IKM			76,61	79,00	N/A	N/A	N/A	76,91	78,91	N/A	N/A	N/A	100,39%	99,88%	N/A	N/A	N/A

26	Hearing Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama		Hearing Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Jumlah peserta hearing				800	800	N/A	N/A	N/A	10	839	N/A	N/A	N/A	1,25 %	104,88 %	N/A	N/A	N/A
27	Kegiatan Reses		Kegiatan Reses	jumlah doklap reses				150	150	N/A	N/A	N/A	49	150	N/A	N/A	N/A	32,67 %	100%	N/A	N/A	N/A
28	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunker				108	108	N/A	N/A	N/A	48	243	N/A	N/A	N/A	44,44 %	225%	N/A	N/A	N/A
29	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	jumlah peserta				3.892	3.892	N/A	N/A	N/A	242	1.857	N/A	N/A	N/A	6,22 %	47,71 %	N/A	N/A	N/A
30	Rapat paripurna		Rapat paripurna	Jumlah peserta				7.646	7.646	N/A	N/A	N/A	958	3.968	N/A	N/A	N/A	12,53 %	51,90 %	N/A	N/A	N/A
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	%				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A

32	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dok				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A
34	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	laporan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A
35	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun.	laporan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A
36	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Set.DPRD yang difasilitasi	bulan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A

38	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	jenis				N/A	N/A	2 jenis	2 jenis	2 jenis	N/A	N/A	2 jenis	2 jenis	N/A	N/A	N/A	2 jenis	2 jenis	N/A
39			2) Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
40	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kali				N/A	N/A	12 kali	12 kali	12 kali	N/A	N/A	12 kali	12 kali	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali	N/A
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	laporan				N/A	N/A	17	17	17	N/A	N/A	17	17	N/A	N/A	N/A	17	17	N/A
42	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	%				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

43	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	oran g				N/A	N/A	47	47	47	N/A	N/A	47	47	N/A	N/A	N/A	47	47	N/A
44	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
45	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	jenis				N/A	N/A	9	9	9	N/A	N/A	9	9	N/A	N/A	N/A	9	9	N/A
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Jenis				N/A	N/A	4	4	4	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A
47	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	Jenis				N/A	N/A	2	2	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A
48	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.Volume BBM yang didistribusikan	volu me				N/A	N/A	20.580	20.580	20.580	N/A	N/A	20.580	20.580	N/A	N/A	N/A	20.580	20.580	N/A

49			2. Jumlah pengadaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	dokumen				N/A	N/A	11	11	11	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A
50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	Lembar				N/A	N/A	3.500	3.500	3.500	N/A	N/A	3.500	3.500	N/A	N/A	N/A	3.500	3.500	N/A
51			Jumlah pemenuhan barang penggandaan	Buku				N/A	N/A	125	125	125	N/A	N/A	125	125	N/A	N/A	N/A	125	125	N/A
52	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jenis				N/A	N/A	66	66	66	N/A	N/A	66	66	N/A	N/A	N/A	66	66	N/A
53	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terwujudnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	orang				N/A	N/A	720	720	720	N/A	N/A	720	720	N/A	N/A	N/A	720	720	N/A
54	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan				N/A	N/A	350	350	350	N/A	N/A	350	350	N/A	N/A	N/A	350	350	N/A
55	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

		Daerah																					
56	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor Bangunan Lainnya	Terlaksananya a Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	unit				N/A	N/A	1 unit	1 unit	1 unit	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	
57	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	
58	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	bula n				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	
59	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	jenis				N/A	N/A	17	17	17	N/A	N/A	17	17	N/A	N/A	N/A	17	17	N/A	
60	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	

		Daerah																				
61	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	unit				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A
62			2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	unit				N/A		5	5	5	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A
63	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit				N/A	N/A	39 (14 R4;25 R2)	39 (14 R4;25R 2)	39 (14 R4;25R 2)	N/A	N/A	39 (14 R4;2 5R2)	39 (14 R4;2 5R2)	N/A	N/A	N/A	39 (14 R4;25 R2)	39 (14 R4;25 R2)	N/A
64			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	unit						39 (14 R4;25 R2)	39 (14 R4;25R 2)	39 (14 R4;25R 2)	N/A	N/A	39 (14 R4;2 5R2)	39 (14 R4;2 5R2)	N/A	N/A	N/A	39 (14 R4;25 R2)	39 (14 R4;25 R2)	N/A

65	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Sekretariat DPRD yang dipelihara	gedung				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A
66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	unit				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A
67	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terwujudnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	%				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
68	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas pim & Anggota DPRD	stel				N/A	N/A	150	150	150	N/A	N/A	150	150	N/A	N/A	N/A	150	150	N/A
69	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah peserta medical check up DPRD	peserta				N/A	N/A	50	50	50	N/A	N/A	50	50	N/A	N/A	N/A	50	50	N/A
70	Layanan Administrasi DPRD	Terwujudnya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	%				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
71	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR	Jumlah rapat paripurna	Kali				N/A	N/A	30	30	30	N/A	N/A	30	30	N/A	N/A	N/A	30	30	N/A

72			Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kali				N/A	N/A	132	132	132	N/A	N/A	132	132	N/A	N/A	N/A	132	132	N/A
73	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.IKM	Indeks				N/A	N/A	82,85	85,30	88,31	N/A	N/A	82,85	85,30	N/A	N/A	N/A	82,85	85,30	N/A
74			2. IPP	Indeks				N/A	N/A	3,00	3,00	3,00	N/A	N/A	3,00	3,00	N/A	N/A	N/A	3,00	3,00	N/A
75	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	dok				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A
76			2.Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	dok				N/A	N/A	22	22	22	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A
77	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah dokumen program pembentukan perda	Dok				N/A	N/A	2	2	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A

78	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan raperda	Dok				N/A	N/A	7	7	7	N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	7	7	N/A
79	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah dokumen kajian perundang2an	dok Kajian				N/A	N/A	22	22	22	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A
80	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ke terangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dok naskah akademik	dok NA				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A
81	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	laya nan				N/A	N/A	366	366	366	N/A	N/A	366	366	N/A	N/A	N/A	366	366	N/A
82	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah bimtek yang diikuti dewan	Kegi atan				N/A	N/A	6	6	6	N/A	N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	6	6	N/A
83	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terwujudnya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi	kali taya ng				N/A	N/A	342	342	342	N/A	N/A	342	342	N/A	N/A	N/A	342	342	N/A
84	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang ditetapkan	oran g				N/A	N/A	8	8	8	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A
85	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggara an Hubungan	Jumlah hearing	Juml ah hear				N/A	N/A	10	10	10	N/A	N/A	10	10	N/A	N/A	N/A	10	10	N/A

		Masyarakat		ing																			
86	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi	prosentase				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	
87	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pim dan anggota DPRD	kali				N/A	N/A	21	21	21	N/A	N/A	21	21	N/A	N/A	N/A	21	21	N/A	
88	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah dok laporan reses	dok				N/A	N/A	150	150	150	N/A	N/A	150	150	N/A	N/A	N/A	150	150	N/A	
89	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi	prosentase				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	
90	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah konsultasi dan koordinasi yang difasilitasi	kegiatan				N/A	N/A	110	110	110	N/A	N/A	110	110	N/A	N/A	N/A	110	110	N/A	
91	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas pim DPRD yang difasilitasi	Kegiatan				N/A	N/A	50	50	50	N/A	N/A	50	50	N/A	N/A	N/A	50	50	N/A	

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Uraian			Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
Program Kegiatan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran	6.009.601.695	5.688.777.900	N/A	N/A	N/A	5.682.127.462	5.380.967.488	N/A	N/A	N/A	95%	95%	N/A	N/A	N/A	-5,34%	-5,30%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah layanan adm. Perkantoran	6.009.601.695	5.688.777.900	N/A	N/A	N/A	5.682.127.462	5.380.967.488	N/A	N/A	N/A	95%	95%	N/A	N/A	N/A	-5,34%	-5,30%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat DPRD	4.040.559.000	1.459.897.300	N/A	N/A	N/A	3.704.243.897	1.349.115.018	N/A	N/A	N/A	91,68%	92,41%	N/A	N/A	N/A	-63,87%	-63,58%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	2.626.175.000	421.183.000	N/A	N/A	N/A	2.374.403.200	372.408.300	N/A	N/A	N/A	90,41%	88,42%	N/A	N/A	N/A	-83,96%	-84,32%
Pemeliharaan rutin/berkala/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	483.800.000	387.781.200	N/A	N/A	N/A	477.436.500	383.779.030	N/A	N/A	N/A	98,68%	98,97%	N/A	N/A	N/A	-19,85%	-19,62%
Pemeliharaan rutin/berkala/berat sarana dan prasarana gedung kantor		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/berat sarana dan prasarana gedung kantor	238.164.500	152.998.100	N/A	N/A	N/A	178.083.000	95.739.000	N/A	N/A	N/A	74,77%	62,58%	N/A	N/A	N/A	-35,76%	-46,24%

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	145.519.500	120.435.000	N/A	N/A	N/A	138.274.697	120.202.188	N/A	N/A	N/A	95,02%	99,81%	N/A	N/A	N/A	-17,24%	-13,07%
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pakaian dinas pim & Anggota DPRD serta pakaian olah raga setwan	546.900.000	377.500.000	N/A	N/A	N/A	536.046.500	376.986.500	N/A	N/A	N/A	98,02%	99,86%	N/A	N/A	N/A	-30,97%	-29,67%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kursus dan pelatihan	777.200.000	582.724.200	N/A	N/A	N/A	561.170.100	445.694.300	N/A	N/A	N/A	72,20%	76,48%	N/A	N/A	N/A	-25,02%	-20,58%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja kursus - kursus singkat atau pelatihan , belanja bimtek setwan	777.200.000	582.724.200	N/A	N/A	N/A	561.170.100	445.694.300	N/A	N/A	N/A	72,20%	76,48%	N/A	N/A	N/A	-25,02%	-20,58%
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .	48.694.200	7.261.200	N/A	N/A	N/A	33.225.000	7.090.000	N/A	N/A	N/A	68,23%	97,64%	N/A	N/A	N/A	-85,09%	-78,66%
Penyusunan Rencana strategis startegis	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%
Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dok Renja yang tersusun	20.000.000	3.791.200	N/A	N/A	N/A	6.145.000	3.620.000	N/A	N/A	N/A	30,73%	95,48%	N/A	N/A	N/A	-81,04%	-41,09%
penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Dok . laporan capaian kinerja yang tersusun	16.694.200	-	N/A	N/A	N/A	15.270.000	-	N/A	N/A	N/A	91,47%	0,00%	N/A	N/A	N/A	-100,00%	-100,00%
Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah Dok . Laporan keuangan yang tersusun	12.000.000	3.470.000	N/A	N/A	N/A	11.810.000	3.470.000	N/A	N/A	N/A	98,42%	100,00%	N/A	N/A	N/A	-71,08%	-70,62%
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan	22.113.800.000	20.403.820.000	N/A	N/A	N/A	18.340.732.515	21.049.158.221	N/A	N/A	N/A	82,94%	103,16%	N/A	N/A	N/A	-7,73%	14,77%

		yang tepat fungsi																	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD			19.116.800.000	19.116.800.000	N/A	N/A	N/A	16.537.794.175	20.031.013.067	N/A	N/A	N/A	86,51%	104,78%	N/A	N/A	N/A	0,00%	21,12%
		Jumlah peserta Medical Check up Dewan	11.766.800	11.766.800	N/A	N/A	N/A	10.766.800	640.400	N/A	N/A	N/A	91,50%	5,44%	N/A	N/A	N/A	0,00%	-94,05%
		Jumlah Peserta Bimtek Dewan	17.654.027.375	17.654.027.375	N/A	N/A	N/A	15.654.027.375	19.688.372.667	N/A	N/A	N/A	88,67%	111,52%	N/A	N/A	N/A	0,00%	25,77%
		Jumlah frekwensi Kunker luar daerah Dewan	1.451.005.825	1.451.005.825	N/A	N/A	N/A	873.000.000	342.000.000	N/A	N/A	N/A	60,17%	23,57%	N/A	N/A	N/A	0,00%	-60,82%
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah		Jumlah kunker pim dan anggota DPRD luar daerah	2.997.000.000	1.287.020.000	N/A	N/A	N/A	1.802.938.340	1.018.145.154	N/A	N/A	N/A	60,16%	79,11%	N/A	N/A	N/A	-57,06%	-43,53%
Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	354.750.000	207.530.000	N/A	N/A	N/A	251.735.000	203.260.000	N/A	N/A	N/A	70,96%	97,94%	N/A	N/A	N/A	-41,50%	-19,26%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Terlaksananya rapat pembahasan raperda	24.750.000	7.750.000	N/A	N/A	N/A	-	6.060.000	N/A	N/A	N/A	0,00%	78,19%	N/A	N/A	N/A	-68,69%	100,00%
Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD		Terlaksananya Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD	330.000.000	199.780.000	N/A	N/A	N/A	251.735.000	197.200.000	N/A	N/A	N/A	76,28%	98,71%	N/A	N/A	N/A	-39,46%	-21,66%
Program Layanan Persidangan		Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas layanan	1.780.360.000	1.397.785.000	N/A	N/A	N/A	1.031.613.000	672.560.000	N/A	N/A	N/A	57,94%	48,12%	N/A	N/A	N/A	-21,49%	-34,81%

		persidangan																	
Hearing Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama		Hearing Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	25.100.000	31.500.000	N/A	N/A	N/A	465.000	12.832.000	N/A	N/A	N/A	1,85%	40,74%	N/A	N/A	N/A	25,50%	2659,57%
Kegiatan Reses		Kegiatan Reses	834.750.000	601.535.000	N/A	N/A	N/A	468.575.000	347.790.000	N/A	N/A	N/A	56,13%	57,82%	N/A	N/A	N/A	-27,94%	-25,78%
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	161.200.000	161.200.000	N/A	N/A	N/A	24.800.000	13.800.000	N/A	N/A	N/A	15,38%	8,56%	N/A	N/A	N/A	0,00%	-44,35%
Rapat - rapat alat kelengkapan dewan		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	180.980.000	210.250.000	N/A	N/A	N/A	90.799.000	80.459.000	N/A	N/A	N/A	50,17%	38,27%	N/A	N/A	N/A	16,17%	-11,39%
Rapat paripurna		Rapat paripurna	578.330.000	393.300.000	N/A	N/A	N/A	446.974.000	217.679.000	N/A	N/A	N/A	77,29%	55,35%	N/A	N/A	N/A	-31,99%	-51,30%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	N/A	N/A	45.403.561,858	47.400.639,059	45.442.736,858	N/A	N/A	37.817.785,963	40.677.264,652	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,04%	N/A
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	38.573.600	38.573.600	38.573.600	N/A	N/A	29.870.000,00	30.732.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	N/A	N/A	28.573.600	28.573.600	28.573.600	N/A	N/A	23.570.000,00	24.432.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun.	N/A	N/A	10.000.000	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A	6.300.000,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	N/A	39.903.219.357	39.913.219.357	39.913.219.357	N/A	N/A	31.920.147.697	4.112.818.451	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,01%	N/A
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Set.DPRD yang di fasilitasi	N/A	N/A	39.583.660.357	39.583.660.357	39.583.660.357	N/A	N/A	31.610.547.697	3.801.473.451	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	N/A	N/A	329.559.000	329.559.000	329.559.000	N/A	N/A	309.600.000	311.345.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		2) Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	319.559.000	319.559.000	319.559.000	N/A	N/A	309.600.000	311.345.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	N/A	N/A	10.000.000	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A	8.300.000	8.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	N/A	N/A	548.778.000	548.778.000	548.778.000	N/A	N/A	548.619.980	495.348.454	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	548.778.000	548.778.000	548.778.000	N/A	N/A	548.619.980	495.348.454	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	2.804.078.900	3.501.768.900	3.501.768.900	N/A	N/A	3.196.291.484	3.851.440.808	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,52%	N/A
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	30.766.600	30.766.600	30.766.600	N/A	N/A	27.655.600	30.690.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	181.707.300	181.707.300	181.707.300	N/A	N/A	161.998.750	82.196.150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	N/A	N/A	24.488.000	24.488.000	24.488.000	N/A	N/A	19.904.100	21.513.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Volume BBM yang didistribusikan	N/A	N/A	441.126.000	785.756.000	785.756.000	N/A	N/A	524.913.440	657.982.520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		2. Jumlah pengadaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi																	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	N/A	N/A	29.175.000	223.175.000	223.175.000	N/A	N/A	207.237.500	228.805.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan																	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	N/A	N/A	63.640.000	70.300.000	70.300.000	N/A	N/A	70.282.000	71.030.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.385.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	2.033.176.000	2.033.176.000	2.185.576.000	N/A	N/A	2.184.300.094	2.688.838.138	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	54.000.000	597.240.000	455.817.750	N/A	N/A	455.817.750	281.818.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	N/A	N/A	54.000.000	597.240.000	455.817.750	N/A	N/A	455.817.750	281.818.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	928.560.000	928.560.000	928.560.000	N/A	N/A	805.268.597	855.084.479	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	N/A	N/A	-	-	3.625.000,00	N/A	N/A	271.118.548	3.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	N/A	N/A	353.160.000	353.160.000	353.160.000	N/A	N/A	271.118.548	287.607.023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	N/A	N/A	575.400.000	575.400.000	575.400.000	N/A	N/A	534.150.049	562.977.456	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	539.040.201	539.040.201	1.082.812.349	N/A	N/A	539.737.455	1.082.812.349	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	N/A	N/A	181.362.000	181.362.000	232.510.000,00	N/A	N/A	167.239.455	196.937.850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	N/A	N/A	83.377.500	83.377.500	527.740.000,00	N/A	N/A	191.638.000	293.040.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A
		2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Sekretariat DPRD yang dipelihara	N/A	N/A	91.800.701	321.756.124	197.403.150	N/A	N/A	289.520.250	197.403.150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	N/A	182.500.000	182.500.000	188.865.000	N/A	N/A	147.425.000	188.865.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terwujudnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	N/A	N/A	154.621.800	154.621.800	35.151.787.168	N/A	N/A	396.328.700	34.568.095.964	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	N/A	N/A	-	-	34.507.086.668			-	34.355.680.164	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas pim & Anggota DPRD	N/A	N/A	111.250.000	111.250.000	596.165.500	N/A	N/A	391.165.500	204.671.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah peserta medical check up DP	N/A	N/A	43.371.800	43.371.800	48.535.000	N/A	N/A	5.163.200	7.744.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Layanan Administrasi DPRD	Terwujudnya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	N/A	N/A	432.690.000	667.905.000,00	664.856.000	N/A	N/A	310.083.000	411.024.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR	Jumlah rapat paripurna	N/A	N/A	432.690.000	667.905.000,00	664.856.000	N/A	N/A	310.083.000	411.024.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan																	

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. IKM	N/A	N/A	27.971.589.000	26.847.291.000	26.555.861.928	N/A	N/A	18.614.062.448	22.063.202.204	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		2. IPP																	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	N/A	N/A	315.460.000	315.460.000	454.876.250	N/A	N/A	247.726.250	191.267.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
		2. Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan																	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah dokumen program pembentukan perda	N/A	N/A	6.100.000	6.100.000	7.143.750	N/A	N/A	1.443.750	5.462.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan raperda	N/A	N/A	51.160.000	51.160.000	84.857.500	N/A	N/A	43.607.500	29.105.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah dokumen kajian perundang2an	N/A	N/A	34.200.000	34.200.000	65.575.000	N/A	N/A	31.375.000	33.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dok naskah akademik	N/A	N/A	224.000.000	224.000.000	297.300.000	N/A	N/A	171.300.000	123.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	N/A	N/A	4.053.930.000	4.053.930.000	6.400.171.066	N/A	N/A	2.482.987.050	4.074.925.714	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah bimtek yang diikuti dewan	N/A	N/A	3.326.930.000	3.326.930.000	4.677.739.832	N/A	N/A	1.779.055.800	3.095.285.714	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terwujudnya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi	N/A	N/A	367.000.000	367.000.000	848.599.984	N/A	N/A	381.350.000	427.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	N/A	N/A	336.000.000	336.000.000	229.500.000	N/A	N/A	300.500.000	157.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang ditetapkan	N/A	N/A	336.000.000	336.000.000	598.500.000	N/A	N/A	300.500.000	384.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing	N/A	N/A	24.000.000	24.000.000	45.831.250	N/A	N/A	22.081.250	11.640.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah serap aspirasi yang terfasilitasi	N/A	N/A	685.780.000	257.450.000	646.450.000	N/A	N/A	147.025.000	495.090.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pim dan anggota DPRD	N/A	N/A	108.700.000	43.050.000	29.400.000	N/A	N/A	5.400.000	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah dok laporan reses	N/A	N/A	577.080.000	214.400.000	617.050.000	N/A	N/A	141.625.000	495.090.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yg terfasilitasi	N/A	N/A	22.916.419.000	22.550.319.000	21.932.102.912	N/A	N/A	15.736.324.148,00	17.301.918.990	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah konsultasi dan koordinasi yang difasilitasi	N/A	N/A	20.668.766.000	20.302.666.000	19.893.030.912	N/A	N/A	15.379.028.874,00	16.579.774.154	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas pim DPRD yang difasilitasi	N/A	N/A	2.247.653.000	2.247.653.000	2.039.072.000	N/A	N/A	357.295.274,00	722.144.836	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A

Pada Program fasilitasi perumusan produk hukum Renstra lima tahunan ditargetkan sampai 100% pada tahun kelima. Pada pencapaian realisasi lima tahunan target tersebut belum dapat tercapai. Meskipun dari segi keuangan capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 100% namun dilihat dari capaian kinerjanya sudah mendekati target.

Berikut gambaran umum beberapa hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 sd 2022 berikut permasalahannya :

1. Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD
Kegiatan Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD target terealisasi 82% dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak tercapai realisasinya seperti sisa kegiatan dari penyusunan naskah akademik dan lain lain meskipun realisasi kegiatannya tetap dapat tercapai 100% yaitu 4 naskah akademik
2. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Realisasi fisik kegiatan dapat terlaksana 99 kegiatan sedangkan Realisasi Keuangan 85 %.
3. Kegiatan Reses, Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai perencanaan yaitu 3 kali reses

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Terbitnya berbagai kebijakan nasional secara mendadak dan inkonsisten yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah, sehingga menyebabkan perubahan dalam proses maupun substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Rendahnya komitmen menyelesaikan tugas dibidang legeslasi .
3. SDM pelayanan sektoral dari daerah lain maupun stakeholder yang semakin kompeten, sehingga sumberdaya pelayanan Sekretariat DPRD harus selalu dikembangkan dan sensitif terhadap globalisasi;
4. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses pelayanan kedewanan ;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil pelayanan kedewanan . Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan kedewanan , sehingga tercipta rasa memiliki terhadap DPRD Kabupaten Jombang;
6. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas dan harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat;
7. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan kedewanan dalam memberikan kontribusi/masukan bagi penyusunan kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan selanjutnya.
8. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Bupati Jombang tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD.
9. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada

Pimpinan Dewan.

10. Dinamika kegiatan Dewan.

11. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Jombang sehingga memungkinkan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, serta stakeholder pelayanan kedewanan lainnya;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang merupakan peluang pasar bagi produk daerah maupun kemajuan pelayanan kedewanan ;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas;
4. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
5. Makin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang secara bertahap telah dibangun melalui program nasional pemberdayaan masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kabupaten Jombang , PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D). dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dprd Kabupaten Jombang . Dalam perkembangannya diketahui bahwa Peraturan Bupati ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kedewanan .

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang me penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kedewanan perlu melakukan perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.Guna mendukung kinerja tersebut, maka kemampuan sumberdaya pelayanan perlu ditingkatkan. Sumber daya Sekretariat DPRD yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar Bagian ;
3. Masih adanya beban kerja serta tugas pokok dan fungsi bagian /sub bagian yang tidak proporsional;
4. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
5. Sistem aplikasi pelayanan kedewan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
6. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan kesekretariatan DPRD sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan administrasi kedewan.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Set. DPRD Kab. Jombang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Fasilitasi tugas DPRD belum optimal	Kurangnya maksimalnya sumber daya Set. DPRD	Terbatas atau masih rendahnya infra dan supra struktur di Set. DPRD
2	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi	Terbatasnya Anggaran, sarana dan prasarana	SOP penyelenggaraan pelayanan belum memadai.
3	Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tupoksi	Belum ada sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan

3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dengan Pemerintahan di atasnya .

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Kabupaten Jombang Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Propinsi Jawa Timur , demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyiapkan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan UU MD3, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah sistem pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Setjen dan Badan Keahlian DPR RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Hal ini menyebabkan posisi dan kedudukan Setjendan Badan Keahlian DPR RI tidak sama dengan kementerian/ lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. Perbedaan tersebut dapat terlihat ketika kementerian dapat mengambil peran dalam salah satu bidang pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan, namun untuk Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, peran yang dilakukan adalah mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI sebagai lembaga perwakilan (legislatif) yang merupakan salah satu cabang kekuasaan pemerintahan negara, di samping kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif). Mengingat DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka DPR tidak hanya terkait dengan bidang politik, melainkan semua aspek pembangunan, dalam kapasitas sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI juga perlu memperhatikan Renstra DPR RI. Demikian Juga Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang maupun Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur .

3.3 Isu-isu Strategis

Sehubungan belum dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang maka isu strategis muncul di masing-masing bagian dapat dimunculkan sebagai berikut. Isu pada Bagian Umum adalah bagaimana memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD termasuk di dalamnya fungsi humas dan keprotokoleran. Bagian Keuangan memiliki isu strategis yaitu memberikan fasilitasi yang benar dan cepat berkaitan dengan daya dukung pendanaan terhadap agenda kegiatan DPRD dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki isu

strategis bagaimana memberikan penyiapan fasilitasi yang cepat dan cermat terhadap kegiatan sidang DPRD dari sisi bahan, notulensi dan pendokumentasian risalah, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan produk hukum.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bahwasanya Tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan yang akan diwujudkan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif transparan & efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas		Indeks Good Governance			
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	76,99	78,6	80,02
		Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	7,4	7,41	7,41

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arti Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk diketahui Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada tabel. 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.) Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;	1). Nilai Evaluasi AKIP	1. Melaksanakan Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan dalam mendukung kegiatan DPRD	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
					2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatur	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					3. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					4. Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	4. Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

			2.) Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	2). Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	1. Mewujudkan optimalisasi layanan peningkatan kapasitas DPRD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
					2. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab terdahulu perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, sub. Kegiatan dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 6.1. (terlampir)

Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan, sub. Kegiatan dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (SIGMAOUTPUT) SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
							Tahun -1 2024		Tahun -2 2025		Tahun -3 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9										
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui deregulasi kebijakan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	4	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	47.408.686.494	100	48.358.539.444	100	47.668.826.389		
			4	02	01	201		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	Persen	100	40.250.000	100	40.250.000	100	40.250.000	
			4	02	01	201	01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	3	25.700.000	3	25.700.000	3	25.700.000
			4	02	01	201	06		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	14.550.000	5	14.550.000	5	14.550.000
			4	01	01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Persen	100	6.150.107.466	100	7.543.036.122	100	7.543.036.122
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	5.819.297.466	31	7.212.226.122	31	7.212.226.122
			4	01	01	202	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen	12	316.260.000	12	316.260.000	12	316.260.000
			4	01	01	202	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	16	14.550.000	16	14.550.000	16	14.550.000
			4	02	01	205			Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	498.850.000	100	562.706.000	100	486.050.000
			4	02	01	205	11		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Orang	50	486.050.000	50	562.706.000	50	486.050.000
			4	02	01	205	2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai ASN di PD	Orang	30	12.800.000	30	-	30	-
			4	02	01	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	2.746.974.075	100	3.132.456.400	100	2.478.914.075
			4	02	01	206	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	26.144.900	20	30.733.650	20	26.144.900
			4	02	01	206	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	163.174.725	21	86.549.000	21	159.674.725
			4	02	01	206	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	21.929.750	17	21.929.750	17	21.929.750
4	02	01	206	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	116.732.000	1	761.277.000	1	116.732.000			
4	02	01	206	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	10	32.416.700	10	228.875.000	10	32.416.700			

4	02	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	75.264.000	10	71.040.000	10	75.264.000
4	02	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	94.500.000	12	79.800.000	12	94.500.000
4	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	2.216.812.000	12	1.852.252.000	12	1.952.252.000
4	02	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	10	100.000.000	-	16.000.000	-	12.350.000
4	02	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-	-	4	19.499.750	4	16.975.000
4	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	819.667.405	100	819.672.280	100	866.332.300
4	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	271.009.980	48	271.009.980	48	317.670.000
4	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	laporan	60	548.657.425	60	548.662.300	60	548.662.300
4	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	1.271.795.456	100	1.237.755.000	100	1.237.755.000
4	02	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	302.510.000	5	262.510.000	5	262.510.000
4	02	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	594.940.000	39	594.940.000	39	594.940.000
4	02	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	191.958.456	1	197.918.000	1	197.918.000
4	02	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	112	182.387.000	112	182.387.000	112	182.387.000
4	02	01	215		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	Persentase Layanan Keuangan dan	Persen	100	35.183.337.092	100	34.661.708.892	100	34.661.708.892
4	02	01	215	01	Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	Orang/Bulan	50	34.507.087.092	50	34.507.087.092	50	34.507.087.092
4	02	01	215	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	3	551.250.000	3	111.250.000	3	111.250.000
4	02	01	215	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	125.000.000	50	43.371.800	50	43.371.800
4	02	01	216		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	Persen	100	597.705.000	100	325.455.000	100	325.455.000
4	02	01	216	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi	laporan	12	597.705.000	12	325.455.000	12	325.455.000
Meningkatnya	Indeks	4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,31	24.119.640.500	87,92	24.119.640.50	88,1	25.119.640.500
						2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,3		3,395		3,42	

kualitas layanan	Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	4	02	02	201		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan	Dokumen	3	315.460.000	3	315.460.000	3	315.460.000
		4	02	02	201	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	6.100.000	2	6.100.000	2	6.100.000
		4	02	02	201	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	Dokumen	7	51.160.000	7	51.160.000	7	51.160.000
		4	02	02	201	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	20	34.200.000	20	34.200.000	20	34.200.000
		4	02	02	201	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah	Dokumen	3	224.000.000	3	224.000.000	3	224.000.000
		4	02	02	202		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan	Dokumen	2	107.000.000	2	102.320.000	2	102.320.000
		4	02	02	202	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Dokumen	1	53.500.000	1	51.160.000	1	51.160.000
		4	02	02	202	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	53.500.000	1	51.160.000	1	51.160.000
		4	02	02	204		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan	Orang	50	4.535.565.500	50	4.535.565.500	50	4.535.565.500
		4	02	02	204	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	3.496.078.000	6	3.496.078.000	6	3.496.078.000
		4	02	02	204	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	Dokumen	342	367.500.000	342	367.500.000	342	367.500.000
		4	02	02	204	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	Orang	4	360.000.000	4	360.000.000	4	360.000.000
		4	02	02	204	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	288.000.000	8	288.000.000	8	288.000.000
		4	02	02	204	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hubungan Masyarakat	Dokumen	10	23.987.500	10	23.987.500	10	23.987.500
		4	02	02	205		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan	Kegiatan	3	1.329.068.000	3	616.568.000	3	616.568.000
		4	02	02	205	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	5	77.298.000	5	77.298.000	5	77.298.000
		4	02	02	205	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	3	67.670.000	3	67.670.000	3	67.670.000
		4	02	02	205	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Dokumen	150	1.184.100.000	150	471.600.000	150	471.600.000
		4	02	02	208		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yg difasilitasi	Tugas	2	17.832.547.000	2	18.549.727.000	2	19.549.727.000
		4	02	02	208	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	350	15.793.475.000	350	16.510.467.000	350	17.510.467.000
4	02	02	208	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan	Dokumen	50	2.039.072.000	50	2.039.260.000	50	2.039.260.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 (terlampir).

Tabel 7.1 Indikator kinerja Sekretariat DPRD

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (SIGMAOUTPUT) SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2024	2025	2026
			Target	Target	Target
5	6	8	9		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	Persen	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	3	3	3
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	5	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Persen	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	31	31
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen	12	12	12
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	16	16	16
Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Orang	50	50	50
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai ASN di PD	Orang	30	30	30
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	21	21
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	17	17
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	1	1
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	Paket	10	10	10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	10
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	10	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	48	48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	laporan	60	60	60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	39	39
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1
emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	112	112	112
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	Persen	100	100	100
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	Orang/Bulan	50	50	50
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	3	3	3
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	50
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	Persen	100	100	100
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi	laporan	12	12	12
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,31	87,92	88,12
	2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,3	3,395	3,425
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan	Dokumen	3	3	3
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	2	2
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	7	7	7
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	20	20	20
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3	3	3
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	2	2	2
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	1
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	1
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	50	50	50
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6	6
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	Dokumen	342	342	342
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	Orang	4	4	4
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	8	8
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dokumen	10	10	10
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan	3	3	3
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	5	5	5
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	3	3	3
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	150	150	150
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi	Tugas	2	2	2
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	350	350	350
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	50	50	50

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang disusun mendasari adanya Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, diperlukan penyusunan rencana startaegis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Starategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dapat mewujudkan sinergitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat daerah/Provinsi maupun pusat . Rencana Starategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan maka Penyusunan Renja (Renja) dan Rencana Starategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2024 -2026 ini.

Jombang, 3 Maret 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG SRIYADI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 198903 1 007